

## REINTERPRETATION OF UNDERSTANDING PANCASILA AND THE VALUE OF DIVERSITY POST-REFORM ERA

### REINTERPRETASI PEMAHAMAN PANCASILA DAN NILAI-NILAI KEBHINEKAAN PASCA REFORMASI

Rizal Al Hamid\*

\*Rizal.alhamid@uin-suka.ac.id

#### Abstarct

*The presence of Pancasila in the midst of the diversity of Indonesians is a gift in itself for every individual in this archipelago country. Besides it has a very high, comprehensive and general philosophical value, indirectly, Pancasila is always and is currently dealing with global ideologies, which according to some people are still controversial, such as capitalism, communism and liberalism. Because in this case, we feel greatly benefited by the founding fathers of this nation, where every point of the five precepts, which include divinity, humanity, unity, populism, and social justice, has represented a very heterogeneous and heterogeneous population entity of the State. As if it is an inseparable unity, Pancasila is often combined with multicultural values because of the diversity of its inhabitants, both culturally, in customs, in lifestyle, to belief in their God. So in this case it can be said that multiculturalism is a real form and a portrait of our country, and Pancasila is the device or tool. As a pillar and portrait of the reality of our country, Pancasila and the plurality of its citizens have, are, and will always experience various perspectives of studies, interpretations, and the accompanying polemics, especially in post-reformation. In this simple article, we will explore how the twists and turns of Pancasila in this multicultural nation, especially after the fall of the new order.*

**Keywords:** Pancasila, Multiculturalism, Bhineka Tunggal Ika, Reform

#### Abstrak

*Kehadiran Pancasila di tengah keragaman bangsa Indonesia merupakan anugerah tersendiri bagi setiap individu di negara kepulauan ini. Selain memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi, komprehensif dan umum, secara tidak langsung Pancasila selalu dan saat ini berhadapan dengan ideologi-ideologi global yang menurut sebagian kalangan masih kontroversial, seperti kapitalisme, komunisme, dan liberalisme. Karena dalam hal ini kita merasa sangat diuntungkan oleh para founding fathers bangsa ini, dimana setiap butir dari lima sila, yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, telah mewakili entitas penduduk yang sangat heterogen dari bangsa ini. Negara. Seolah-olah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Pancasila sering dipadukan dengan nilai-nilai multikultural karena keragaman penduduknya, baik secara budaya, adat istiadat, gaya hidup, hingga kepercayaan kepada Tuhannya. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa multikulturalisme adalah wujud nyata dan potret negara Indonesia, dan Pancasila adalah perangkat atau alatnya. Sebagai pilar dan potret realitas negara Indonesia, Pancasila dan pluralitas warganya telah, sedang, dan akan selalu mengalami berbagai perspektif kajian, interpretasi, dan polemik yang*

---

\* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*menyertainya, terutama pasca reformasi. Dalam artikel sederhana ini, akan mengupas bagaimana lika-liku Pancasila di negara multikultural ini, terutama pasca tumbangnya orde baru.*

**Kata Kunci:** Pancasila, Multikulturalisme, Bhineka Tunggal Ika, Reformasi

## PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri dari beribu pulau, ratusan suku dan bahasa, serta enam agama yang resmi dianutnya, merupakan bentuk *real* Negara Indonesia, yang kaya akan keanekaragaman. Hal ini sama persis dengan realita 17angs aini, dimana ia menjadi keberkahan tersendiri bagi yang mengerti rumus dan cara memainkannya, namun pada sisi yang bersamaan juga dapat menjadi bom waktu, lantaran tidak terakomodasi dengan baik sehingga menimbulkan disintegrasi antar golongan. Ada juga anggapan bahwa perbedaan adalah musuh sekaligus ancaman, yang keberadaannya harus ibumi-hanguskan.<sup>1</sup>

Pendapat tersebut tentu sangat berlebihan, melihat bahwa keragaman budaya, adat istiadat, ras, agama, hingga pandangan politik, bukan merupakan sumber substantif dari sebuah konflik hingga menimbulkan disintegrasi bangsa.<sup>2</sup> Justru ragam perbedaan itulah yang menjadi jembatan menuju upaya integrasi bagi Negara ini, atau dalam arti lain, realita masyarakat yang begitu majemuk dan plual ini, dapat memotivasi penduduknya agar lebih optimis dalam upaya proses integrasi secara holistik dan komperhensif.

Terjadinya sebuah ancaman, permusuhan, perpecahan, hingga disintegrasi bangsa, bermula saat masyarakatnya tidak mampu lagi memadukan

komponen peranti musik hingga terbentuk sebuah aransemen yang indah. Di samping juga adanya golongan-golongan tertentu yang menganggap dirinya mayoritas dan superior, yang pada akhirnya tentu terjadi dikotomi dan diskriminasi terhadap mereka yang merasa dirinya minoritas dan inferior.<sup>3</sup> Oleh karenanya dibutuhkan perangkat pemahaman dan tekak yang kuat di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengapresiasi ragam perbedaan tersebut, seperti dikotomi kaum mayoritas-superior terhadap kaum minoritas-inferior, yang antar dari mereka, tidak akan mampu mempertahankan eksistensinya selama tidak ada upaya gandeng tangan antar mereka. Jangan sampai apa yang pernah dituliskan oleh Kusumohamidjojo dalam bukunya menjadi hal yang nyata, bahwa Dikotomi mayoritas-minoritas, superior-inferior pada aspek multikulturalisme bisa menjadi tragedi besar, bila ditumpangi dengan muatan politik-ideologis ataupun ketimpangan dalam kesempatan kinerja ekonomi.

Sejak sebelum berdirinya sebagai Negara merdeka, Indonesia sudah menghadapi persoalan besar yang berkaitan dengan keanekaragaman kebudayaan dan agama, salah satunya adalah pertentangan pada penetapan sila pertama dalam

---

<sup>1</sup>. Husein Muslimin, *Tantangan terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni, (2016), 31.

<sup>2</sup>. Mukthie, *Konstitusionalisme Demokrasi*, Malang: In-Trans Publising, (2016). 321

<sup>3</sup>. M. Nurkhoiron, *Minoritisasi dan Agenda Multikulturalisme di Indonesia: Sebuah Catatan Awal, dalam Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, diedit oleh Marsudi Noorsalim, Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation, (2007). 201

Pancasila, yaitu antara kelompok nasionalis dan kelompok agama.<sup>4</sup>

Bangsa Indonesia yang majemuk dan plural ini, harus dilihat dari sudut pandang multikulturalisme, dan bukan dari sudut pandang satu kelompok atau golongan saja. hal ini juga sejalan apa yang dikatakan Suseno, bahwa Indonesia hanya dapat bersatu, bila keanekaragaman menjadi kenyataan sosial yang dihormati.<sup>5</sup> Artinya, tegaknya NKRI tidak hendak menghapuskan identitas setiap elemen bangsa, namun justru guna membentuk suatu bangsa yang tidak saling menyaingi atau merasa tersaingi antar sesama dari mereka.

Rasa dan sikap saling menghormati lintas golongan, dengan tanpa memaksakan pandangan dan pendapat sendiri, merupakan kunci mutlak keberhasilan bagi Negeri ini, baik dahulu, kini, hingga di masa depan. Oleh karenanya, dibutuhkan seperangkat transformasi kesadaran jiwa multikulturalisme menjadi identitas dan integrasi nasional, dengan meletakkan pondasi agama sebagai nilai kesatuan bangsa.

## PEMBAHASAN

### Degradasi Semangat Juang

Merdekanya bangsa Indonesia tidak lain adalah ingin membentuk suatu Negeri yang mandiri, dan berdiri dengan pondasi semangat juang persatuan dan kesatuan, hingga tercapainya tujuan bangsa yang, berdaulat, bersatu, adil dan makmur bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini tentu berangkat dari sila ketiga pancasila yaitu persatuan Indonesia, di mana fakta historis Negeri ini yang begitu multikultural, memiliki cita-cita mulia yaitu “bersama untuk hidup dalam satu atap sebuah bangunan, yang bernamakan NKRI, tanpa melihat

latar belakang budaya, ras, agama, hingga pandangan politik”<sup>6</sup>. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri, betapa kompleksnya polemik dan permasalahan yang dihadapi oleh Negeri ini terkait dengan sisi plualitas dan multikultural, yang tidak jarang menimbulkan gesekan antar golongan tertentu.

Di era orde lama misalnya, para pemimpin mengobarkan transformasi semangat juang bhineka tunggal ika dengan wacana populis, guna melawan faham kapitalisme dan iperialisme, karena menurutnya, hanya dengan cara itulah, harkat-martabat persatuan dan kesatuan Negeri ini dapat memperoleh kemenangan. Sejarah telah menjadi saksi, bahwa upaya orde lama dalam menghimpun semangat persatuan dan kesatuan dengan konsep NASAKOM (Nasionalis, Agamis dan Komunis), justru melahirkan segmentasi baru di kalangan publik, yaitu politik yang berbasis ideologi.<sup>7</sup>

Hal ini karena di dalamnya terdapat tiga partai yang samang-masing memilik basis dan karakteristik berbeda, di mana PNI berbasis nasional, Masyumi dan PSI berbasis agama, dan PKI berbasis komunis.<sup>8</sup> Inilah yang pernah dikatakan oleh Nur Khoiron, bahwa Sistem politik multipartai yang telah diterapkan pemerintahan Orde Lama, sudah membawa warga Indonesia pada polemik dan gejolak politik yang teramat melelahkan, hingga pada akhirnya mencapai puncak ketegangannya saat tragedi berdarah yang kita ketahui yaitu pada 30 September 1965.<sup>9</sup>

Beda orde, tentu beda pula gaya dan sistem kepemimpinannya, pada era orde baru, penguasa lebih mengoptimalkan kekuasaan dan dominasi masa dengan melalui demobilisasi dan deideologisasi. Berbagai kebijakan kebudayaan di

<sup>4</sup>. Franz Magnis Suseno, *Berebut Jiwa Bangsa*, Jakarta: Kompas, (2006). 312.

<sup>5</sup>. Suseno, 312.

<sup>6</sup>. H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, (2004). 142.

<sup>7</sup>. Samuel P Huntington., *Benturan Antar peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Qalam, (2003). 218.

<sup>8</sup>Huntington. 219.

<sup>9</sup>. M. Nurkhoiron, *Minoritisasi dan Agenda Multikulturalisme di Indonesia: Sebuah Catatan Awal, dalam Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa, ....* 221.

masa orde baru, mengarah pada kematangan stabilitas nasional dengan mengarahkan berbagai macam budaya daerah pada setiap wilayah menjadi pondasi dan identitas kebudayaan nasional.<sup>10</sup>

Hasilnya dapat terlihat yaitu berupa proses pembakuan, sehingga hal ini melahirkan dampak pada tumpangnya perbedaan budaya sekaligus hilangnya beberapa kebudayaan lokal. Etnisitas dan agama tidak dikelola sesuai jalan multikulturalisme, sehingga hal tersebut acap kali menjadi sentrum konflik hingga perpecahan. Pada masa tersebut pula pemerintah telah mengambil langkah dominan dalam hal kebijakan multikulturalisme, yaitu melalui interpretasi tunggal terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa.<sup>11</sup>

Seakan menjadi peluang emas, tumpangnya orde baru yang ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto di tangan para barisan mahasiswa sebagai *agent of change*,<sup>12</sup> menjadi lembaran baru akan berseminya kembali bunga pluralitas dan kemajemukan bangsa yang telah lama terkubur lebih dari 30 tahun lamanya. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, sangat diapresiasi dan diberikan ruang tak terbatas, oleh para kelompok yang pada masa orde baru tidak memiliki peluang untuk berkembang. Kelompok-kelompok tersebut mulai membangun pondasi eksistensi dengan memainkan isu ideologi yang berkembang. Kelompok Islam misalnya, mereka berbondong-bondong membangun laskar paramiliter guna membela Tuhannya. Lebih dari itu, di sebagian wilayah bahkan terjadi pemaksaan

kehendak untuk ditegakkannya syariat Islam sebagai bagian dari kebijakan publik daerah.<sup>13</sup>

Tidak hanya Islam, kaum nasrani di Papua juga memaksakan diri untuk ditegakkannya perda berbasis injil. Bali dengan mayoritas pemeluk agama Hindu yang taat pun demikian, melalui gemanya wacana ajeg Bali, mereka telah banyak menyerukan pertahanan identitas kultural tersebut, di samping juga dengan semakin berkembangnya zaman, yang dengan dua faktor itu (kebebasan berpendapat pasca lengsernya Soeharto dan berkembangnya zaman), dapat menimbulkan proses modernisasi dan globalisasi di kemudian hari.<sup>14</sup>

Isu multikulturalisme sebagai gejala politik, dengan isu multikulturalisme sebagai gejala epistemologis. Ketika keduanya tidak dapat ditanggapi dan dihadapi dengan kejernihan hati, maka tentu terasa sukar untuk berangan banyak akan terciptanya persatuan dan kesatuan dalam diri masyarakat Indonesia. Salah satu proponent teori multikulturalisme terkenal yaitu Parekh bahkan pernah menuangkan gagasannya akan entitas pendudukan Indonesia yang begitu heterogen ini, bahwa multikulturalisme bukanlah sebuah doktrin politik dengan muatan programatik, tidak pula sebagai sebuah aliran filsafat dengan teori yang khas tentang tempat manusia di dunia, melainkan lebih sebagai sebuah perspektif atau cara melihat kehidupan manusia.<sup>15</sup>

### Nilai-nilai Kebhinekaan

Sumber dari bentuk nasionalisme dari sejak berdirinya Negeri ini adalah dengan menekankan pentingnya cita-cita bersama, seperti pengakuan

<sup>10</sup>. Dahliani, *Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era*, Jurnal Internasional *Education and Research* Vol. 3 No. 6, Juni (2015). 159.

<sup>11</sup>. Mahammad bakhsh, B., Fathiazar, E., Hobbi, A., Ghodrathpour, M. *Globalization and local and global identities among Iranian students*, Jurnal Internasional *Intercultural Relations* 36, (2012). 70.

<sup>12</sup>. Rizal Al-Hamid, *Moral Politik Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Tinjauan Filosofis Hukum Islam*, Jurnal al-Adalah. Vol. 4, No. 2, Desember 2019. 179.

<sup>13</sup>. Dahliani, *Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era*, ... 160.

<sup>14</sup>. Dahliani, 161-162.

<sup>15</sup>. Bhiku Parekh, *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius, (2007). 89.

akan berbagai macam perbedaan, penghargaan terhadap ragam budaya, hingga rasa saling memiliki satu sama lain akan Negeri ini, yang kesemuanya itu merupakan upaya pengikat kebangsaan dalam bersosial dan bermasyarakat.

Upaya semacam itulah yang tampak begitu jelas pada semboyan bangsa ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana ia menekankan akan betapa pentingnya cita-cita mulia bangsa ini dalam hal kemajemukan, sebagai upaya perekat keberagaman dan kebangsaan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Sparringa, bahwa pada prinsipnya, etika ini menegaskan pada pentingnya komitmen negara untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak, dan pada pihak lain tercapainya cita-cita kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia.<sup>16</sup>

Sekurang-kurangnya terdapat dua peristiwa besar bersejarah, di mana mereka merelakan posisi dominannya demi persatuan dan kesatuan NKRI. *Pertama* adalah dalam peristiwa sumpah pemuda 1928, di mana mereka para pemuda *jong java* merelakan bahasa melayu sebagai bahasa Indonesia.<sup>17</sup> Jika dahulu bahasa jawa yang dijadikan bahasa resmi Negeri ini, maka NKRI akan sebatas dipahami sebagai republik jawa raya, sehingga konsekwensinya, bahwa suku minang, batak, dayak, bali, sunda dsb, besar kemungkinan tidak akan dapat terintegrasi secara holistik.

*Kedua* adalah saat sidang penetapan sila pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Kesepakatan tersebut memastikan bahwa Indonesia adalah milik seluruh penduduk dari sabang hingga merauke, dengan tanpa adanya perbedaan berdasarkan suku yang dimiliki, agama yang diyakini, hingga pandangan politik yang

digenggamnya, juga tanpa adanya dikotomi mayoritas-minoritas, atau superior-inferior.<sup>18</sup> Hal ini tercermin dari kesukarelaan para wakil umat Islam untuk tidak mengharuskan dan menuntut posisi eksklusif dalam UUD, walaupun secara kuantitas, Islam merupakan agama terbesar di Negeri ini. Dapat dibayangkan betapa jika saat itu sila pertama mencantumkan esensi dari suatu agama tertentu, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat Indonesia di wilayah timur, tidak akan masuk ke dalam wilayah NKRI, atau bahkan titik pahitnya, bersatu namun tidak terjadi kesatuan. Sejak dulu Indonesia dikenal luas oleh dunia sebagai Negara kepulauan yang memiliki tingkat pluralitas, heterogenitas, dan kemajemukan yang paling tinggi dari Negara-negara lain di dunia. Didalam penelitian etnologi diketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 600 suku bangsa dengan perbedaan identitasnya masing-masing dan dengan kebudayaan yang berbeda.<sup>19</sup>

Bhineka Tunggal Ika yang sebenarnya masih memiliki sambungan kalimat setelahnya, yaitu Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa,<sup>20</sup> merupakan sesanti agung yang mengingatkan kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negeri ini. Di dalamnya bermakna ragam perbedaan, namun tetap satu, karena tidak ada suatu kebenaran yang mendua.

Sejarah menyebutkan bahwa di dalam kakawin sutasoma mpu tantular, secara eksplisit disebutkan, bahwa bhineka tunggal ika pada mulanya merupakan langkah jitu dalam menyelesaikan sebuah konflik perbedaan antara agama hindu (siwa) dengan agama budha.<sup>21</sup> Dibentuknya rumusan upaya tersebut tidak lain ditujukan guna menghindari konflik yang

<sup>16</sup>. Daniel Sparringa, *Multikulturalisme Indonesia: Nilai-nilai Baru untuk Indonesia Baru (sebuah Jawaban terhadap Kemajemukan)*. Makalah disampaikan dalam seminar tentang "Pendidikan Nilai-nilai Kehidupan Ditinjau dari Berbagai Perspektif Ilmu" yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya, Jakarta, 18 November, (2006). 11.

<sup>17</sup>. Sparringa. 11.

<sup>18</sup>. Sparringa, 12.

<sup>19</sup>. Abd Mu'id Aris Shofa, *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli (2016), 38.

<sup>20</sup>. Shofa, 40.

<sup>21</sup>. D.N. Wijaya. *Jean-Jacques Rousseau dalam Demokrasi*, Jurnal Politik Indonesia. Vol.1, No.1, (2016). 20.

berkepanjangan antara kedua agama besar tersebut kala itu. Seiring berlalunya zaman, dipilahlah kata Bhineka Tunggal Ika pada pita lambing burung garuda, karena menurut para *founding father* dan historian Negeri ini, kata tersebut memiliki makna yang begitu menyentuh, dalam menjaga dan melestarikan persatuan dan kesatuan Negeri ini.

### Sejarah dan Ancaman Pancasila

Pancasila memiliki pesan, nilai, dan cita-cita begitu dalam, betapa bahwa secara substantif, pola dari proses panjang terbentuknya pancasila tidak lain adalah hasil yang didapat dari bumi pertiwi ini sendiri, bukan komparasi atau nukilan dari Negara lain. Dalam arti lain, bahwa ia diambil dari hasil kekayaan Negeri ini yang mencakup kekayaan bahasa, alam, budaya, etnis, hingga agama. Bermula dari hal inilah pancasila mulai dikenal sebagai *opened ideology* atau ideologi terbuka, karena kehadirannya mampu menampung dan menerima semua golongan.<sup>22</sup> Lebih dari itu, keterbukaan ideologi yang dimiliki pancasila, terbukti mampu mengikuti arlur bergulirnya zaman, fleksibel, dan dinamis, karena sejak awal, ia merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri.

Ideologi Pancasila yang merupakan konsensus politik ini tidak hanya menjadi representasi bagi setiap ragam golongan di Indonesia saja, lebih dari itu, ia juga memiliki peran dalam menampung semua aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Sehingga secara historis, kita telah dibuat kagum oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila, di mana ia mampu menentukan jalan tengah antara ideologi ekstim yaitu sekuler, dengan ideologi berbasis

agama, yang bahkan tanpa adanya sebuah pertikaian dan perpecahan di dalamnya. Hal ini tentu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa, di mana jalan tengah tersebut, merupakan sebuah perwujudan dari karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri, yang majemuk, plural, heterogen.

Bisa kita bayangkan betapa jika saat itu Negeri ini mengambil salah satu dari dua pilihan ideologi tersebut, dengan tanpa melihat jalan tengah yang menjadi masa depan cerahnya. Bisa jadi hingga detik ini, konflik dengan konflik masih saja terjadi antara dua ideologi tersebut. Padahal selamanya Negeri ini tidak bisa dipaksakan untuk perpegang pada satu ideologi, di mana ideologi tersebut bukan cerminan dari masyarakat Indonesia itu sendiri, yang nota bene multi etnis, budaya, bahasa, hingga agama.<sup>23</sup> Betapa begitu hebatnya para *founding father* Negeri ini, di mana mereka telah membangun sebuah pondasi yang begitu kokoh bagi satu bangsa yang multi bahasa, etnik, budaya, hingga multi religi, bahkan di dalamnya memiliki beribu pulau, dan dengan sumber daya alam yang begitu melimpah.

Dalam salah satu karyanya, As'ad Said Ali pernah meuangkan pujiannya tentang kebesaran Negeri ini, bahwa menurutnya, Pancasila adalah titik pertemuan atau *nukthatul liqo* yang lahir dari suatu kesadaran bersama pada saat krisis.<sup>24</sup> Kesadaran tersebut muncul dari kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar membentuk bangsa yang besar. Pancasila adalah suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis.<sup>25</sup>

Bait-bait yang terkandung di dalam setiap sila pancasila tentu tidak lahir begitu saja, namun ia lahir dari hasil pemikiran yang begitu mendalam. Hal tersebut juga tidak lepas dari beberapa

---

<sup>22</sup>. Susetiawan., *Pluralitas dan Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multikultural, dalam Spiritualitas Multikultur Sebagai Landasan Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: kanisius, (2006). 198.

<sup>23</sup>. Susetiawan 200.

<sup>24</sup>. As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, (2009). 22.

<sup>25</sup>. Said Ali, 23.

persiapan dan pembentukan kepanitiaan dalam hal persiapan kemerdekaan Indonesia, atau yang dikenal dengan BPUPKI (Badang penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), di mana sidang pertamanya dimulai pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945.<sup>26</sup> Pada sidang pertama tersebut, BPUPKI fokus pada pembahasan hingga penentuan dasar Negara. Hingga pada akhirnya, ditetapkanlah Pancasila sebagai pondasi yang akan menjadi ideologi dan pedoman masyarakat Indonesia hingga detik ini.<sup>27</sup>

Hal tersebut di atas dapat diketahui dari beberapa literatur sejarah Indonesia, bahwa saat Dr Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyo diningrat menyampaikan pidato pembukaan sidang BPUPKI, beliau mengajukan beberapa pertanyaan kepada para anggota, salah satunya adalah “Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini ?”.<sup>28</sup> Dari berkat pertanyaan beliau, beberapa tokoh dalam forum tersebut kemudian mengutarakan gagasannya, di antaranya adalah Mohammad Yamin pada pidatonya di tanggal 29 Mei 1945, di mana beliau menyampaikan lima pilar Negara Indonesia, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ke-Tuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.<sup>29</sup>

Di akhir pidatonya, secara tertulis beliau menyampaikan akan gagasannya tersebut, yang secara eksplisit dapat dimaknai sebagai cikal bakal lahirnya Pancasila, yaitu Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia, Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.<sup>30</sup>

Lebih lanjut, dua hari pasca Mohammad Yamin menyampaikan usulannya, yaitu di tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo menyampaikan usulan yang hampir senada, yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah, dan Keadilan rakyat. Di hari berikutnya, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan lima pilar bangsa, yang kurang lebih juga tidak jauh berbeda dari dua tokoh sebelumnya, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan.<sup>31</sup>

Ketiga gagasan dari Mohammad Yamin, Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno kemudian dibahas oleh panitia sembilan, tepatnya yaitu pada tanggal 22 Juni 1945.<sup>32</sup> Pada akhirnya, lahirlah sebuah rumusan yang memberikan titik terang akan maksud dan tujuan dari dibentuknya Negara Indonesia Merdeka, atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter*.<sup>33</sup> Di akhir tanggal persidangan, yaitu pada 10 hingga 17 Juli, BPUPKI menerima isi laporan dari panitia Sembilan tersebut tentang piagam Jakarta, yang di dalamnya juga terdapat rancangan pembukaan UUD 1945.<sup>34</sup>

Setelah usainya BPUPKI, tugas persiapan kemerdekaan diambil alih oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945.<sup>35</sup> Hingga pada tanggal 18 Agustus, terjadi sedikit perbedaan pendapat tentang piagam Jakarta, yang pada akhirnya dicapailah kesepakatan bersama, yaitu dengan merubah Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945, sekaligus titik final dari perumusan Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

<sup>26</sup>. Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, (2012). 9.

<sup>27</sup>. Meinarno, E.A., Suwartono, C. *The Measurement of Pancasila: An Effort to make Psychological Measurement from Pancasila Values*. Jurnal Ilmiah Mind Set. Vol. 2 No. 2. Juni (2011). 109.

<sup>28</sup>. Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, . 12.

<sup>29</sup>. Latif, 13.

<sup>30</sup>. Latif, 14.

<sup>31</sup>. Latif, 29.

<sup>32</sup>. Latif, 30.

<sup>33</sup>. Yudi Latif, *Wawasan Pancasila: Bintang penuntun untuk Kebudayaan*, Jakarta: Mizan, (2018). 47

<sup>34</sup>. Latif, 48.

<sup>35</sup>. Robert W Hefner, *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius, (2007). 90.

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>36</sup>

Dalam salah satu pidatonya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (periode 2015-2017) pernah menyampaikan aspirasinya tentang Pancasila, bahwa ia tidak dapat diubah, karena merupakan kristalisasi dari jiwa bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, kekeluargaan, gotong royong, dan toleran.<sup>37</sup>

Selama bertahun-tahun sejak berdirinya Negeri Indonesia, beserta ideologi yang mengiringinya, masyarakat Indonesia hampir tidak memiliki permasalahan berarti dengan Pancasila. Namun pasca reformasi, entitas Pancasila mulai dipersoalkan oleh sejumlah rakyatnya sendiri. Keterpurukan di berbagai sektor, menjadikan Pancasila dijadikan sebagai kambing hitam, dan bukan justru sebagai jalan solusi dalam menuntaskan berbagai masalah kala itu. Menurut mereka hanya liberalisme dan kapitalisme yang telah terbukti memenangkan pertarungan ideologi dunia, dan hanya keduanya yang bisa menyelamatkan Indonesia.<sup>38</sup> Bahkan, ada salah seorang tokoh yang terang-terangan menyatakan diri bahwa "Aku adalah seorang neoliberalis". Sementara yang lain berani mengatakan, "tinggalkan Pancasila, ikutlah neoliberal".<sup>39</sup>

Semakin bertambah usia Negeri ini, Pancasila justru semakin mendapat banyak ancaman. Pada tahun 2017 misalnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 30.AH.0108 Tahun 2017, bahwa Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI harus

dibubarkan lantaran sebagai organisasi masyarakat, aktivitasnya justru banyak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI.<sup>40</sup> Belum lagi paham-paham radikalisme dan ekstremisme, yang telah banyak terbukti berusaha ingin menjadikan Negeri ini hanya berpihak pada satu budaya dan agama tertentu saja. Yang hal demikian sudah barang tentu sangat jauh dari nilai-nilai pluralitas dan kemajemukan warga Indonesia dengan sekian banyak keragaman yang dimilikinya.

### Aplikasi Pancasila Pasca Reformasi

Secara primordial, fungsi Pancasila tidak akan berubah dan siapapun tidak boleh merubahnya, karena ia merupakan titik final dari hasil musyawarah mufakat oleh para *founding father* negeri ini, baik itu sebagai dasar negara, maupun ideologi negara Indonesia. Walau demikian, jika kita melihat Pancasila sebagai ideologi terbuka, ia harus mampu menyesuaikan dinamika masyarakat yang sedang berkembang dan melaju begitu pesat. Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat yang bijak, sudah menjadi hal yang niscaya bahwa peran dan kedudukan Pancasila yang begitu luhur, harus selalu mendapat porsi kajian ilmiah, sebagai upaya *upgrading* dan aktualisasi ilmiah, agar dalam perjalannya, ia tidak disalahartikan lantaran zaman yang telah berubah.

Peran Pancasila yang memiliki fungsi ganda, baik sebagai dasar maupun ideologi Negara, kedudukannya tidak dapat diganggu gugat atau ditawar lagi. Sejalan dengan hal ini, mantan ketua Mahkamah Konstitusi yaitu M. Mahfud MD pernah menegaskan bahwa Pancasila yang telah diumumkan di dalam Pembukaan Undang Dasar

<sup>36</sup>. Latif, 91.

<sup>37</sup>. Husein Muslimin, *Tantangan terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi, ...* 32.

<sup>38</sup>. Abd Mu'id Aris Shofa, *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, ... 39.

<sup>39</sup>. As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemakmuran Berbangsa, ...* 38.

<sup>40</sup>. E.A. Meinarno, *Pancasila dan merah putih di serambi Mekah*. Jurnal Pancasila Vol. 1. No. 1. 2014. 53.

1945 adalah *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia.<sup>41</sup> Pancasila sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia dengan berbagai kepentingan yang semula mungkin saling bertentangan secara diametral.

### 1. Sebagai ideologi Negara

Ideologi Negara merupakan cita-cita bangsa, atau cita-cita yang menjadi basis suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa, yang secara substantif merupakan asas kerohanian, dan di dalamnya terkandung sebuah ketinggian derajat sebagai nilai hidup berbangsa dan bernegara.<sup>42</sup> Di dalam ideologi Negara juga terdapat pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.<sup>43</sup>

Soekarno mengatakan bahwa “Pancasila digali dari bumi pertiwi, dan bumi Indonesia sendiri”. itu artinya, ia memiliki nilai-nilai ruhani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia, yang memang telah ada sejak Negara ini ada. Sehingga dapat kita katakan bahwa Pancasila sebagai ideologi Negara, bukan merupakan ideologi yang diperoleh dari hasil komparasi berbagai Negara, hingga menghasilkan lima sila tersebut, melainkan murni berkat kemajemukan masyarakatnya, baik dari sisi budaya, bahasa, agama, hingga kekayaan alamnya yang begitu melimpah.

Sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila juga tidak sekedar didukung, atau hanya sebatas mendapatkan pembenaran dari berbagai individu maupun golongan, melainkan ia juga sepatutnya dibutuhkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia milik bersama, milik masyarakat Indonesia, dan siapa dan apapun golongannya, ia akan

menemukan jati diri dan kepribadiannya pada karakteristik Pancasila sebagai ideologi bernegara. Ideologi Pancasila yang bersifat progresif, fleksibel, aktual, dinamis, terbuka, hingga mampu menyesuaikan zaman, sedikitnya memiliki tiga dimensi di dalamnya, yaitu:

a. Dimensi realistik: pada dimensi ini, Pancasila sebagai ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, ia juga harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dalam bermasyarakat, maupun dalam segala aspek penyelenggaraan Negara. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, tidak bersifat utopis atau imajinasi semata, yang di dalamnya hanya berisikan ide-ide yang abstrak. Setiap sila Pancasila memiliki bersifat realistik, dan mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata pada berbagai bidang.<sup>44</sup>

b. Dimensi idealis: merupakan dimensi Pancasila yang merepresentasikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, dan bersifat sistematis serta rasional. Nilai-nilai dari dimensi idealis tersebut tercermin dalam lima sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dimensi idealis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis dan transenden, yaitu filsafat Pancasila. Dengan demikian, setiap ideologi bersumber dari pandangan hidup nilai-nilai filosofis dan transenden itu sendiri.

c. Dimensi normatif: di akhir dimensi ini, setiap nilai yang terkandung di dalam Pancasila, perlu mendapat klarifikasi pada suatu sistem norma. Hal ini sebagaimana termaktub dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam graduasi hukum Indonesia. Pada pengertian ini, pembukaan yang di dalamnya

<sup>41</sup>. Achmadudin Rajab, *Tinjauan Hukum Eksistensi dari UUNo. 8 TAHUN 2015 setelah 25 kali Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47 No.3, Juli-September (2016). 360.

<sup>42</sup>. Husein Muslimin, *Tantangan terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi*, mengutip dari buku karya Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, 50.

<sup>43</sup>. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: 113.

<sup>44</sup>. Kaelan, 117.

memuat Pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai *'staats fundamental norm'*, agar ideologi mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional, dan sekaligus memiliki norma yang konkret.<sup>45</sup>

## 2. Sebagai dasar Negara

Sebagai dasar Negara kesatuan republik Indonesia, pancasila tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu: "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".<sup>46</sup>

Walaupun sampai pada anak kalimat di alinea keempat UUD 1945 tidak tersurat secara eksplisit kata pancasila, namun secara substantif ia telah terwakili oleh interpretasi historis yang telah terjadi, yaitu saat BPUPKI melangsungkan sidang perdananya, di mana ketua BPUPKI yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, bertanya dan bersama-sama mengajak para anggotanya dalam menentukan dasar Negara yang akan dibangun ini. Beliau bertanya "apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?" tiga dari sekian anggota BPUPKI mengutarakan gagasannya tentang akan berdirinya Negeri ini. Walaupun di awal forum terdapat beberapa perbedaan pendapat, namun pada akhirnya disepakatilah bahwa dasar Negara ini adalah Pancasila, yang isinya terkandung pada UUD 1945 alinea keempat seperti di atas.

<sup>45</sup>. Kaelan, 117.

<sup>46</sup>. Budiono Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, Jakarta: PT. Grasindo, (2000). 39.

Sebagai sumber tertib hukum, pancasila mengandung konsekuensi yuridis, itu artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan Negara ini, harus selaras dan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. hal ini sekaligus bahwa segala bentuk penyimpangan yang mengotori nama baik pancasila, maka ia akan berhadapan langsung dengan hukum Indonesia yang berlaku. Pokok-pokok fikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUDNRI 1945, yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila yang sudah barang tentu menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara, terdapat sembilan prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan Negara Indonesia dalam rumusan undang-undang di masa depan,<sup>47</sup> di antaranya adalah; Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem republic, Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi, Demokrasi langsung dan perwakilan, Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Checks and Balance*, Sistem Pemerintahan Presidensil, Persatuan dan Keragaman, Paham Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial, Cita Masyarakat Madani

## Dimanika Pancasila dan Nilai-nilai Kebhinnekaan Pasca Reformasi

Sedikitnya terdapat dua lembaga survei yang melakukan penelitian akan respon masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, *pertama* adalah Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), yang langsung berada di bawah naungan Universitas Islam Negeri Jakarta, yang menjelaskan bahwa pada tahun 2007 sebanyak 84,7% responden masih mendukung pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara.<sup>48</sup>

*Kedua* adalah survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 2006. Hasil

<sup>47</sup>. Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, (2005). 201.

<sup>48</sup>. As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, 23. Mengutip dari E.A. Meinarno, *Representasi Sosial dari Pancasila: Konteks Remaja Indonesia*.

survei tersebut adalah bahwa 69,6% responden masih setuju akan sistem ideologi dan dasar Negeri ini berdasarkan pancasila. Dua sisanya adalah bahwa 11,5% menginginkan Indonesia sebagai Negara Islam, dan 3,5% menghendaki Indonesia menganut demokrasi barat.<sup>49</sup> Dari kedua survei yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda dapat kita simpulkan bahwa para responden, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masih mengidealkan pancasila sebagai sistem kenegaraan, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa jiwa-jiwa setiap insan Negeri ini, masih tertancap kuat akan ideologi yang mempersatukan kemajemukan masyarakatnya, yaitu pancasila.

Walau demikian, kita tidak boleh berbesar hati dengan dua hasil survei di atas, karena faktanya, bahwa pengetahuan masyarakat tentang pancasila itu sendiri justru mengalami kemunduran. Dilansir oleh Harian Kompas pada 1 Juni 2008, bahwa dalam surveinya memberikan hasil akan kemerosotan pengetahuan tentang kepancasilaan. Survei tersebut melibatkan tiga golongan responden berdasarkan usia, yaitu antara rentang usia 17 sampai 46 tahun keatas, yang pada kesimpulannya adalah: 48,4% responden usia 17-29 tahun tidak bisa menyebutkan graduasi sila-sila dalam pancasila secara tepat dan benar. 42,7% responden usia 30-45 tahun selalu keliru dalam menyebutkan sila-sila pancasila.

Seadangkan terdapat 60,6% responden usia 46 keatas selalu salah dalam menyebutkan, dan megurutkan graduasi sila-sila pancasila. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, di mana tingginya dukungan masyarakat Indonesia terhadap pancasila seperti yang terdapat pada dua survei di atas, ternyata tidak selaras dengan pengetahuan yang dimiliki mereka tentang pancasila itu sendiri.

---

*Disampaikan pada seminar nasional psikologi multikulturalisme, Kudus, 9 Mei 2011.*

<sup>49</sup>. Meinarno, 23.

<sup>50</sup>. Meinarno, 143.

Pasca tumbangnya orde baru, seakan menjadi phobia tersendiri bagi masyarakat Indonesia terhadap pancasila. Asas sekaligus ideologi Negara yang sedari awal sangat dikagumi, seketika sirna begitu saja lantaran terkesan identik dengan orde baru. Phobia tersebut justru tidak kunjung reda, bahkan dalam lini sosial kemasyarakatan, bangsa Indonesia seakan hilang kendali atas diri mereka sendiri. akibatnya, banyak terjadi konflik horisontal maupun vertikal secara masif, dan hingga pada akhirnya hal tersebut melemahkan setiap sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam hal budaya, kesadaran setiap individu masyarakat atas luhurnya budaya bangsa Indonesia kian hari justru kian luntur, hal tersebut pada akhirnya menimbulkan disorientasi individu dan kepribadian bangsa yang disertai dengan bobroknya moral generasi muda.<sup>50</sup>

Keadaan-keadaan semacam ini menjadi perhatian khusus, terutama bagi kalangan cendekiawan, akademisi, hingga pejabat Negara. Azyumardi Azra misalnya, pada tahun 2004, beliau menggagas sebuah rejuvenasi atau peremajaan terhadap Pancasila sebagai faktor integratif, dan salah satu fundamen identitas nasional.<sup>51</sup> Gema tersebut terlihat begitu signifikan lantaran proses amandemen UUD 1945 saat itu sempat melahirkan piagam Jakarta.

Di lain sisi, Negeri kita saat itu sedang banyak dilanda terorisme yang mengatas namakan agama, bahkan hanya selang beberapa bulan saja, muculah wacana Perda Syariah disejumlah daerah di Indonesia.<sup>52</sup> Semua polemik tersebut, seakan menjadi puncak kegelisahan masyarakat pasca reformasi hingga menimbulkan banyak tanya, akan di bawah ke mana reformasi dan demokasi Negeri ini?. Pada akhirnya, seruan yang dilakukan oleh

<sup>51</sup>. Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhineka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, Jakarta: Kompas Gramedia, (2010). 78.

<sup>52</sup>. Hikmat Budiman (ed), *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Interseksi/ *The Interseksi Foundation*, (2005). 113.

Azra mulai mendapat respon dari sejumlah kalangan, salah satunya adalah dalam sebuah simposium peringatan hari lahir Pancasila, yang diselenggarakan oleh FISIP UI pada 31 Mei 2006.<sup>53</sup>

Sebagai dasar negara, perekat bangsa, dan ideologi negara, Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa memang sejak reformasi, banyak orang terutama generasi muda yang salah sangka mengenai relevansi Pancasila dimasa kini, apalagi mendatang. Anggapan demikian jelas keliru, hal yang banyak dikeluhkan orang-orang dari masa lalu adalah tindakan penyalahgunaan Pancasila untuk kepentingan kekuasaan, dan bukan eksistensi Pancasila itu sendiri yang dijadikan sebagai falsafah hidup dan cermin impian bersama seluruh anak bangsa tentang hidup berbangsa dan bernegara yang kita idealkan bersama.<sup>54</sup>

Dalam kongres Pancasila kesembilan, rektor UGM yaitu Panut Mulyono mengutarakan, bahwa "Pancasila adalah *living ideologi* yang hidup dan dipraktikkan dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Kami sadar dan faham, bahwa dalam dinamika global memberikan tantangan kepada Pancasila, oleh karena itu kami berusaha memahami tantangan itu dan mengatasi dengan baik dan efektif".<sup>55</sup>

## KESIMPULAN

Kesimpulnya bahwa dalam mewujudkan NKRI ini, sekurang-kurangnya dapat ditempuh dengan tiga hal; *pertama*, upaya merubah kesadaran multikulturalisme menjadi sebuah identitas nasional dengan selalu menghargai dan menjunjung tinggi ragam kemajemukan Negeri ini.

*Kedua* adalah, upaya dalam membangun pondasi integrasi nasional yang memiliki asas multikulturalisme, dengan tujuan memperjuangkan hak-hak keadilan, yaitu dengan memotivasi kesadaran masyarakat dalam hal menggunakan hak konstitusinya, baik dalam hal berserikat maupun berpendapat. Hal ini juga sebagai upaya kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan.

Dan ketiga adalah, upaya dalam memaknai makna Multikulturalisme, di mana ia bukan hanya sekedar tuntutan hidup berdasarkan asas bhineka tunggal ika yang penuh toleransi, melainkan juga aplikasi progresi, visioner, dan membangun, sekaligus penghargaan terhadap keberagaman berbagai macam golongan. Sehingga hal tersebut dapat menghasilkan output masyarakat yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, cinta, dan kasih sayang antar golongan. Pancasila merupakan pondasi bangunan yang bernama Indonesia, yang menentukan format ideal dan representasi dari bangunan itu sendiri. Dua peran ganda Pancasila juga tidak boleh kita lupakan, bahwa selain ia sebagai asas Negara, Pancasila juga berperan penting dalam hal ideologi bangsa ini. Dua peran ganda ini selamanya tidak boleh kita ubah, apalagi mengotorinya.

Asas dan ideologi Negara ini secara langsung diperoleh dari bumi pertiwi, itu artinya, Pancasila berasal dari nilai moral dan budaya Bangsa Indonesia itu sendiri, yang sudah ada sejak Bangsa Indonesia ada, dan bukan ideologi komparasi atau ideologi yang dipaksakan dari luar Negeri ini. Selain itu, Pancasila juga memiliki sifat terbuka, sehingga secara otomatis ia selalu dibutuhkan dan tidak hanya sebatas membutuhkan pembenaran. Siapa dan apapun golongannya, ia akan menemukan jati

---

<sup>53</sup>. As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, 52.

<sup>54</sup>. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 203.

<sup>55</sup>. Husein Muslimin, *Tantangan terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi*, 30.

dirinya pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, karena secara primordial, ia bersifat aktual, fleksibel, dinamis dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Pancasila sebagai dasar Negara, secara substantif merupakan sumber tertib hukum dari segala sumber yang ada, di mana sebagai dasar dan ideologi bangsa, ia harus senantiasa tertanam pada diri seluruh rakyat Indonesia. Ia berperan sebagai pedoman, benteng, dan pegangan hidup bangsa, baik dulu, kini, hingga di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamid, Rizal, *Moral Politik Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Tinjauan Filosofis Hukum Islam*, Jurnal al-'Adalah. Vol. 4, No. 2, Desember 2019. hlm. 177-193.
- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila: Jalan Kemashlahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.
- Aris Shofa, Abd Mu'id, *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016, hlm. 34-41.
- Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Budiman, Hikmat (ed), *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Interseksi/*The Interseksi Foundation*, 2005.
- Budiyono, Kabul, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Dahliani, *Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era*, Jurnal Internasional *Education and Research* Vol. 3 No. 6, Juni 2015. hlm. 157-166.
- Hutington, Samuel P., *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Qalam, 2003
- Hefner, Robert W., *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2016
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- , *Wawasan pancasila: Bintang penuntun untuk Kebudayaan*, Jakarta: Mizan, 2018
- Mahammad bakhsh, B., Fathiazar, E., Hobbi, A., Ghodrattpour, M. *Globalization and local and global identities among Iranian students*, Jurnal Internasional *Intercultural Relations* 36, 2012. hlm. 63-71.
- Meinarno, E.A., *Representasi Sosial dari Pancasila: Konteks Remaja Indonesia. Disampaikan pada seminar nasional psikologi multikulturalisme*, Kudus, 9 Mei 2011.
- , E.A., *Pancasila dan merah putih di serambi Mekah*. Jurnal Pancasila Vol. 1. No.1. 2014. hlm. 52-59.
- , E.A., Suwartono, C. *The Measurement of Pancasila: An Effort to make Psychological Measurement from Pancasila Values*. Jurnal Ilmiah Mind Set. Vol. 2 No. 2. Juni 2011, hlm. 104-110.
- Mukthie, *Konstitusionalisme Demokrasi*, Malang: In-Trans Publising, 2016
- Mungmachon ,Roikhwanphut, *Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure*, Jurnal Internasional *Humanities and Social Science*, Vol. 2 No. 13, Juli 2012. hlm.174-181.
- Muslimin, Husein, *Tantangan terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni, 2016, hlm. 30-38.

- Nurkhoiron, M., *Minoritisasi dan Agenda Multikulturalisme di Indonesia: Sebuah Catatan Awal, dalam Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, diedit oleh Marsudi Noorsalim, Jakarta: Yayasan Interseksi/*The Interseksi Foundation*, 2007.
- Oentoro, Jimmy., *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhineka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Parekh, Bhiku., *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Rajab, Achmadudin, *Tinjauan Hukum Eksistensi dari UU No. 8 TAHUN 2015 setelah 25 kali Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47 No.3, Juli-September 2016. hlm. 346-365.
- Sodikin, *Pemilu Serentak: Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 1, April 2014. hlm. 19-31.
- Soewoto, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga No. 1 Tahun V, Januari-Februari, 1990. hlm. 76-87.
- Sparringa, Daniel, *Multikulturalisme Indonesia: Nilai-nilai Baru untuk Indonesia Baru (sebuah Jawaban terhadap Kemajemukan)*. Makalah disampaikan dalam seminar tentang "Pendidikan Nilai-nilai Kehidupan Ditinjau dari Berbagai Perspektif Ilmu" yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya, Jakarta, 18 November 2006.
- Susetiawan., *Pluralitas dan Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multikultural, dalam Spiritualitas Multikultur Sebagai Landasan Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: kanisius, 2006.
- Suseno, Franz Magnis., *Berebut Jiwa Bangsa*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Syarbani, Syahrial, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Tilaar, H.A.R., *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Wijaya, D.N. *Jean-Jacques Rousseau dalam Demokrasi*, Jurnal Politik Indonesia. Vol.1, No.1, 2016. hlm. 14-29.